

LAPORAN TRIWULAN II



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

2020

**PUSAT STANDARDISASI
INDUSTRI**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Standardisasi Industri kepada stakeholder dan pihak terkait maka disusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) TRIWULAN II Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Hal ini merupakan perwujudan komitmen manajemen Pusat Standar disasi Industri dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006, sebagai penerapan prinsip-prinsip transparansi yang akuntabel. Laporan ini memuat seluruh kegiatan pada Pusat Standardisasi Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibiayai dari DIPA tahun 2020.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis pada Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Demikian pula halnya dengan rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembuat kebijakan serta peningkatan bagi seluruh pegawai pada Pusat Standardisasi Industri dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, 3 Juli 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



Ni Nyoman Ambareny

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA	5
PROGRAM/KEGIATAN	5
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020	5
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	7
3.1.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
BERDASARKAN INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	9
3.1.2 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
BERDASARKAN INDIKATOR PADA KINERJA OUTPUT KEGIATAN.....	15
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	22
3.2.1 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	38
3.2.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN KINERJA <i>OUTPUT</i>	
KEGIATAN	22
3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT	22
3.3.1 LANGKAH DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA	
.....	22
3.3.2 LANGKAH DAN TINDAK LANJUTPELAKSANAAN KINERJA OUTPUT	
KEGIATAN	23
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	23
FORM A	
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI	
- FORM ALKI	

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI.....	4
TABEL 2.1 DAFTAR KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020.....	5
TABEL 2.2 SASARAN KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN 2020	5
TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN.....	6
TABEL 3.1 RENCANA AKSI PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020	7
TABEL 3.2 REALISASI PENCAPAIAN TRIWULAN II PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI	9
TABEL 3.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I TRIWULAN II PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	10
TABEL 3.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II TRIWULAN II PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	12
TABEL 3.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III TRIWULAN II PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	13
TABEL 3.6 PAGU ANGGARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020	15
TABEL 3.7 REALISASI OUTPUT I SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020	15
TABEL 3.8 REALISASI OUTPUT II SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020	16
TABEL 3.9 REALISASI OUTPUT III SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020	17
TABEL 3.10 REALISASI OUTPUT IV SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020.....	18
TABEL 3.11 REALISASI OUTPUT V SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020.....	18
TABEL 3.12 REALISASI OUTPUT VI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2020.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi

Pusat Standardisasi Industri merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pustan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

1.2. Latar Belakang Kegiatan

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Hingga saat ini terdapat 4.977 SNI bidang industri dari 11.740 SNI secara nasional. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis/SubKomite Teknis di lingkungan Kemenperin sebanyak 34 KT/SKT yang mencakup berbagai produk/komoditi industri binaan Kementerian Perindustrian. Setiap tahun Komite Teknis/SubKomite Teknis membuat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan pasar.

Untuk kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing;

dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri, maka pemerintah dapat memberlakukan SNI secara wajib.

Hingga akhir TRIWULAN II tahun 2020 SNI telah diberlakukan 113 SNI secara wajib bidang industri yang meliputi komoditi makanan, minuman, kimia, logam, tekstil dan aneka, permesinan, alat transportasi darat, dan elektronika. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama perdagangan secara internasional (WTO) maka Indonesia juga harus mengikuti aturan yang berlaku terkait bidang standardisasi misalnya seperti melakukan notifikasi jika Indonesia akan memberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan mekanisme Technical Barriers to Trade (TBT) – WTO. Selain itu dalam kerjasama regional seperti ASEAN, standar juga telah menjadi perhatian utama dengan dibentuknya ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Dari data yang ada dengan diberlakukannya SNI secara wajib, dapat dilihat dampak secara ekonomi dimana terjadi penurunan nilai impor terhadap produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

Dalam pelaksanaan regulasi teknis, banyak negara melakukan teknik-teknik yang tidak langsung mempersulit pelaku usaha untuk memasukkan produknya ke negara tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa harus dilakukan pengujian dan sertifikasi di lembaga yang terdaftar dalam notified body tersebut. Hal serupa dilakukan pula di US, Jepang, Tiongkok, India, dan negara lainnya.

Mengingat standar saat ini digunakan sebagai barrier di dalam mekanisme perdagangan, maka untuk mengatasi keberagaman skema sertifikasi, ditetapkanlah ISO 17067:2013 (Conformity Assessment – Fundamentals of Product Certification and Guidelines for Product Certification Scheme) mengenai skema sertifikasi yang memperkenankan regulator untuk menyusun skema sertifikasi terkait dengan standar yang ditetapkan menjadi regulasi teknis.

Dalam pelaksanaan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji) yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang tentunya telah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun kompetensi oleh BPPI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian. Skema sertifikasi yang nantinya telah dirumuskan oleh regulator menjadi bagian dari penilaian kelayakan penunjukan LPK.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pustan Industri mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Susunan organisasi Pustan Industri berdasarkan Permenperin tersebut yaitu:

1. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri;
 - a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri;
 - b. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
 - a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
 - b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri;
3. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
 - a. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri;
 - b. Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
4. Subbagian Program dan Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi Industri:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Industri

BAB II RENCANA KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pustan Industri berdasarkan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri. Kegiatan ini memiliki komponen kegiatan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020

1860	Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri
	Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri
	Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain
	Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)
	Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI
1860.002	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri
	Pengawasan Standardisasi Industri
	Penegakan Hukum Standardisasi Industri
1860.003	Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri
	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC
	Peninjauan SNI
	Kajian Standardisasi
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian
	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib
1860.010	Layanan Manajemen Satker
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Rencana Strategis Pustan Industri dan Rencana Kinerja, Pustan Industri pada Tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2020 dengan indikator kinerja seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan Pustan Industri Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam	SNI bidang industri yang diterapkan	5%

	negeri		
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai >80.1

Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

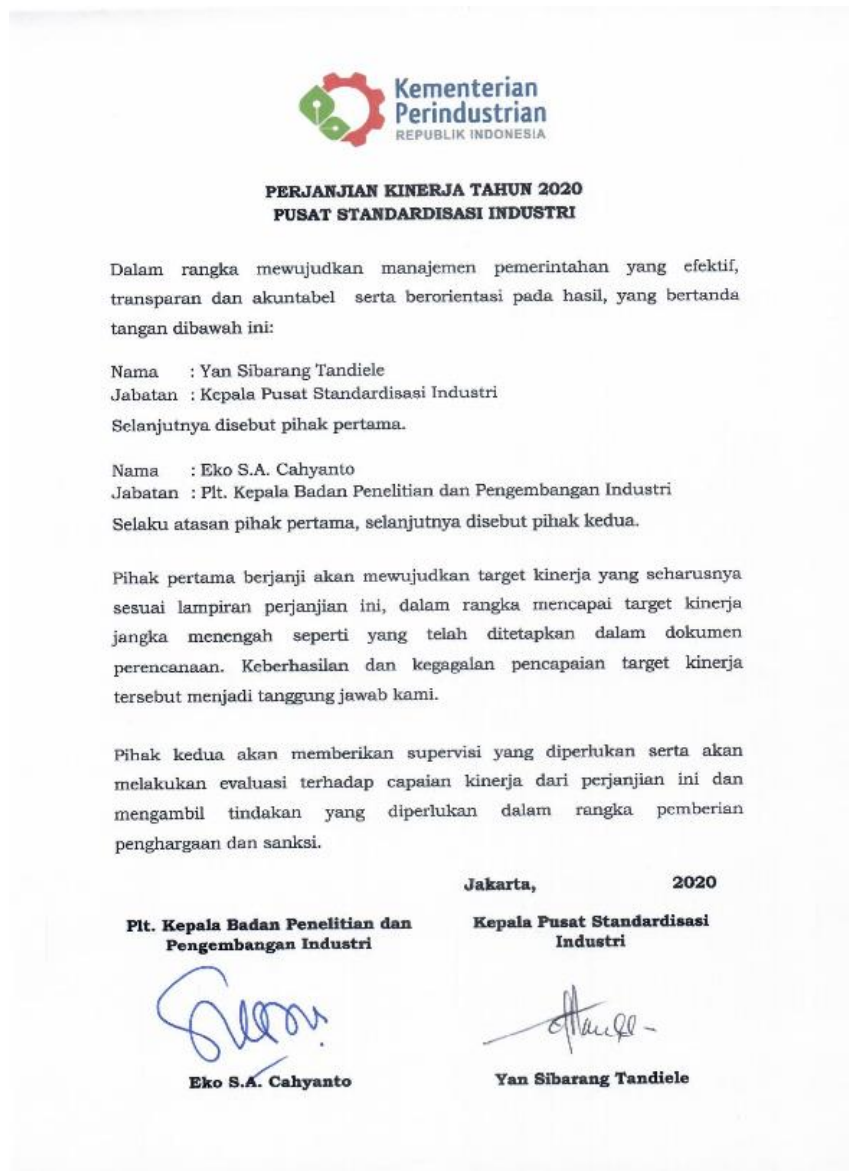
Kode	Output	Indikator Kinerja	Target
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Tersedianya Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Penunjukan LPK	15 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Manajemen PPSI	1 Regulasi
1860.002	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Pengawasan Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
		Penegakan Hukum Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
1860.003	Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	Jumlah Personil PPNS-I	20 Orang
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	Tersedianya RSNI, ST dan/atau PTC	100 Standar
		Jumlah SNI yang ditinjau	1 Laporan
		Jumlah Kajian Standardisasi	2 Kajian
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jumlah Alat	10 Unit
1860.010	Layanan Manajemen Satker	Tersedianya Dukungan Teknis Manajemen Kinerja	1 Laporan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil dan Analisis Capaian yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut

Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 adalah suatu pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Pustan Industri untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Perjanjian Kinerja Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	1. SNI bidang industri yang diterapkan	5	Persen
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	1. Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5	Rancangan
		2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1	Naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangsana dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100	Persen
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80,1	Nilai


Total Anggaran Tahun 2020 : Rp. 26,800,000,000,-
(dua puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah)

Pt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri




Eko S. A. Cahyanto

Jakarta, Januari 2020
Kepala Pusat Standardisasi Industri



Yan Sibarang Tandiele

Tabel 3.1. Rencana Aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020

RENCANA AKSI													
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI													
TAHUN ANGGARAN 2020													
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Koordinator
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	2%	1) Koordinasi dengan Kontek dan Sub Kontek; 2) Perencanaan perumusan RSNi 2018; 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 6) Pengumpulan Data.	3%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI; 5) Pengumpulan Data	4%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNi tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 4) Pembuatan Laporan.	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	25%	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	50%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	75%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis tingkat ASEAN	100%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Penjabaran Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah	25%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	50%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	75%	1) FGD Penyusunan konsep NA 2) Penyusunan Draft NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	100%	1) Finalisasi Konsep NA 2) Penyusunan Laporan	- Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang (bangun) dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	25%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmatritik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	50%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan Pengawasan, Penilaian dan Pemeriksaan (Wasmatritik)	75%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmatritik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	25%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyajian dan pengumpulan bahan rencana kerja	50%	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	75%	1) Pemantapan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	100%	1) penyajian dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan Laporan Kegiatan	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Program dan Tata Usaha
Jakarta, 2 Januari 2020													
Kepala Pusat Standardisasi Industri,													
													
Ni Nyoman Ambareny													

3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dalam Perjanjian Kinerja

Berikut realisasi pencapaian TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN II (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data.	2%	2%
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) 1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional.	50%	38%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Pengumpulan data dan litelatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	50%	38%
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik)	50%	40%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	50%	32%

1. Sasaran Strategis I: Tersusunnya RSNI,ST dan/atau PTC

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Kegiatan I TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN II (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data.	2%	2%

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja :

1. SNI bidang industri yang diterapkan:

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

- 1) Koordinasi dalam rangka membahas perkembangan terkait restrukturisasi Komite Teknis (perubahan SKT menjadi KT dan penyesuaian ruang lingkup KT) serta pembahasan perkembangan perumusan standar industri dengan sektor pembina Komite Teknis di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 2) Monitoring terhadap pelaksanaan perumusan standar bidang industri untuk PNPS tahun 2020;
- 3) Rapat Teknis Perumusan RSNI untuk Komite Teknis:
 - 1.- 59-01, tekstil dan produk tekstil (2 judul PNPS Kebutuhan Mendesak);
 - 2.- 67-04, Makanan (3 judul);
 - 3.- 67-09, Minuman (3 judul);
 - 4.- 67-04-S2, Produk Tembakau (1 judul);
 - 5.- 85-01, Teknologi Kertas (3 judul);
 - 6.- 91-02, Kimia Bahan Konstruksi (1 judul);
 - 7.4) Rapat Konsensus untuk Komite Teknis:
 - 8.- 59-02, Kulit, produk kulit dan alas kaki (2 judul);
 - 9.- 77-01, Logam dan Produk Baja (2 judu);
 - 10.- 83,01, Karet dan Barang Karet (4 judul);
 - 11.- 83-02, Plastik dan Barang Plastik (5 judul PNPS Kebutuhan mendesak).

b. Kendala

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan monitoring perumusan RSNI, sampai dengan saat ini dari 150 usulan PNPS baru (termasuk 11 PNPS Kebutuhan mendesak) terdapat 53 RSNI dalam tahap Rapat Teknis dan 13 RSNI yang sudah dikonsensuskan, terdapat 15 PNPS yang akan dibatalkan/ditunda dikarenakan sektor pembina tidak dapat

melaksanakan tahapan perumusan RSNI lebih lanjut karena pemotongan anggaran terkait perumusan.

c. Rekomendasi

Menindaklanjuti terkait adanya usulan pembatalan beberapa PNPS yang tidak akan dirumuskan pada tahun 2020 serta melakukan monitoring lebih lanjut terkait pelaksanaan tahapan rapat teknis dan rapat konsensus serta koordinasi terkait kebijakan perumusan RSNI dengan menggunakan metode rapat telekonferensi.

2. Sasaran Strategis II: Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian

Tabel 3.4. Pencapaian Sasaran Kegiatan II TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN II (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional.	50%	38%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	50%	38%

Sasaran Strategis II terdiri dari Indikator Kinerja :

1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi

Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Pusat Standardisasi Industri menyiapkan rancangan regulasi teknis dalam penerapan dan pemberlakuan SNI wajib tersebut.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pada TRIWULAN II kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- 1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK,
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK,
- 3) mengikuti sidang ASEAN Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN.

b. Kendala:

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK

dan penyusunan skema sertifikasi Produk SNI Wajib serta Tertunda/terhambatnya pelaksanaan sidang terkait regulasi teknis Standardisasi di tingkat ASEAN.

c.Rekomendasi:

melakukan revisi anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan FGD panel penunjukan secara online.

2.Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu regulasi, dalyang disusun oleh Pusat Standardisasi Industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

Kegiatan pada TRIWULAN II Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- 1) Pengumpulan data dan literature,
- 2) Koordinasi dengan stakeholder.

a. Kendala:

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertunda/ terhambatnya penyusunan Rancangan Peratuan Menteri tentang Penunjukan LPK dan Skema sertifikasi.

b. Rekomendasi

Mengikuti jadwal penyusunan Rancangan kebijakan.

3. Sasaran Strategis III: Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Hukum Proses Industri

Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis III TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN II (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik)	50%	40%

Sasaran Strategis III terdiri dari indikator kinerja:

1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin

Sehubungan dengan pelaksanaan penerapan SNI dan pemberlakuan Standardisasi Industri, maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja LPK terkait kepatuhannya dalam menerbitkan Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi LPK didapat berdasarkan laporan kinerja dan pengawasan LPK oleh Pustan Industri dan akan disampaikan dalam suatu pertemuan guna menjadi koreksi dan perbaikan kedepan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

- 1) Rapat koordinasi,
- 2) Pengawasan ke LPK Turangga, AGS, LUK, Lab Uji Modern Testing,
- 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU,
- 4) koordinasi dengan Kepolisian RI,
- 5) terselenggaranya FGD Pengawasan LPK pada Juni 2020 di Jakarta.

b. Kendala:

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pengawasan LPK dan tertundanya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum standardisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian,

dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) secara berkala/ sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib, Catatan: koordinasi dengan aparat penegakkan hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik.

c.Rekomendasi:

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan.

4. Sasaran Strategis IV: Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi

Tabel 3.6. Pencapaian Sasaran Kegiatan IV TRIWULAN II Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN II (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	50%	32%

Sasaran Strategis IV terdiri dari indikator kinerja:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a.Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

pada TRIWULAN II realisasi fisik tercapai 32% dari 50%. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- 1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021,
- 2) Rapat koordinasi,
- 3) Tersusunnya dokumen penganggaran & program sesuai pagu indikatif PSI TA 2021.

b. Kendala:

Dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021.

c.Rekomendasi:

Menyegerakan pelaksanaan kegiatan yang tertunda setelah situasi memungkinkan.

3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Kegiatan TA 2020 (TRIWULAN II)

	Output	Pagu
		(Rp 000)
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.275.482
1860.002	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.625.486
1860.003	Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri	595.210
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	2.605.140
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	30.971
1860.010	Layanan Manajemen Satker	685.544
	JUMLAH	7.817.833

1. Output I: Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri

Tabel 3.8 Realisasi Output I sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN II			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	2.275.482				
1 Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IKM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.421.258	73.03%	20.74%	55.00%	31.00%
2 Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain	430.498	93.57%	12.80%	58.00%	38.00%
3 Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	254.950	33.61%	15.09%	38.81%	33.50%
4 Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI	168.776	37.51%	23.98%	46.67%	35.20%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:

Pagu anggaran untuk output I sebesar Rp. 2.275.482.000,- TRIWULAN II realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN II Tahun Anggaran 2020

c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III.

2. Output II: Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri

Tabel 3.9 Realisasi Output II sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN II			
		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.625.486				
1 Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perindustrian	94.932	180.33%	2.27%	50.00%	24.00%
2 Penegakan Hukum Standardisasi Industri	533.016	67.70%	22.73%	58.33%	32.50%
3 Penyusunan Sistem Manajemen Pengawasan Standardisasi Industri	164.480	7.59%	1.50%	47.50%	20.00%
4 Forum Pengawasan Standardisasi Industri	231.728	1.29%	0.00%	63.41%	13.75%
5 Pengawasan Standardisasi Industri	601.920	27.37%	22.15%	45.32%	35.90%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:

Output Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri pada TRIWULAN II realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN II Tahun Anggaran 2020

c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

3. Output III: Penguatan SDM Standardisasi Industri

Tabel 3.10 Realisasi Output III sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN II			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri		595.210				
1	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri	595.210	91.77%	91.61%	92.50%	85.00%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Penguatan SDM standardisasi industri pada TRIWULAN II realisasi keuangan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri telah tercapai.

b. Kendala:

-

c. Rekomendasi:

-

4. Output IV: Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri

Tabel 3.11 Realisasi Output IV sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN II			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
Pengembangan Standardisasi Industri		2.605.140				
Kajian Efektivitas Penerapan Sni Semen		328.231	31.14%	12.40%	46.67%	25.00%
Penyusunan Kebijakan Standardisasi Dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4.0		314.425	25.22%	14.07%	42.92%	26.80%
Peninjauan Sni		162.628	32.15%	3.47%	41.25%	34.55%
Rapat Teknis/konsensus		1.724.526	47.23%	25.21%	50.56%	42.60%
Perencanaan Perumusan Rsn		75.330	47.82%	10.27%	48.59%	40.50%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja: Pagu anggaran untuk output IV sebesar Rp. 2.605.140.000,- realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN II Tahun Anggaran 2020

c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

5. Output V: Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri

Tabel 3.12 Realisasi Output V sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN II			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri	30.971				
1 Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib	30.971	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja: Pagu anggaran untuk output V adalah sebesar Rp. 30.971 dengan anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000.000 yang telah dipotong untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan penghentian serta proses pembatalan lelang sesuai dengan surat Sekretaris BPPI Nomor 1125/BPPI.1/PR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal penghentian proses pengadaan dan surat Kepala Pustan Industri Nomor 296/BPPI.4/IV/MS/2020 tanggal 15 April 2020 perihal pembatalan lelang cepat PSI.

b. Kendala:

-

c. Rekomendasi:

-

6. Output VI: Layanan Manajemen Satker

Tabel 3.13 Realisasi Output VI sampai dengan TRIWULAN II TA 2020

Output	Pagu	TRIWULAN II			
		Keuangan		Fisik	
	(Rp 000)	S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Layanan Manajemen Satker	685.544				
1 Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja	171.725	57.52%	27.13%	50.00%	46.00%
2 Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	340.796	7.92%	0.00%	50.00%	30.00%
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Persiapan Penilaian SAKIP	120.668	53.09%	53.73%	73.33%	65.00%
4 Evaluasi Rencana Strategis Pustan Industri	31.940	38.15%	1.41%	36.67%	10.00%
5 Reviu Penerapan SPIP Pusat Standardisasi Industri	20.415	44.06%	9.12%	26.00%	10.00%

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja: Pagu anggaran untuk output V sebesar Rp. 685.544.000,- realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran..

b. Kendala:

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN II Tahun Anggaran 2020

c. Rekomendasi:

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pusat Standardiasi Industri kepada BPPI ada 4 sasaran strategis, masing-masing kegiatan mempunyai target yang harus dicapai tetapi dengan adanya hambatan dan kendala yang ada menyebabkan pencapaian target tidak diperoleh. Hambatan pada tahun 2020 adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan II tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

Kegiatan yang terdapat di Pustan Industri ada 6 (enam) Kegiatan. Sama halnya dengan pelaksanaan berdasarkan perjanjian kinerja, hambatan yang dihadapi terkait pandemi covid 19 dan mekanisme pencairan.

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada triwulan III.

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada triwulan III.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2020 ini terdapat banyak kendala sehingga realisasi keuangan sebesar 24,44% dari target 53,38% dan realisasi fisik 38,37% dari 54,65%. Sedangkan pada TRIWULAN II Tahun 2019, Realisasi Keuangan 19,49% lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 17,70% dan Realisasi Fisik mencapai 39,10% dari target 46,84% pada TRIWULAN II . Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan II tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian TRIWULAN II, Pusat Standardisasi Industri akan melaksanakan kegiatan dengan seefektif dan seefisien mungkin dan turut berkoordinasi dengan BPPI, Direktorat dan lembaga terkait dalam menyelesaikan kegiatan yang ada.

Jakarta, 3 Juli 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



Ni Nyoman Ambareny

LAMPIRAN 2 FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Dalam Rencana Aksi		Realisasi TW II		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak	Penanggung Jawab	Koordinator
				Target fisik (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	3%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNi; 4) Peninjauan SNI; 5) Pengumpulan Data	5,7%	- sosialisasi penerapan SNI, Rapat Konsensus untuk 13 RSNi dari 76 target penyusunan RSNi tahun 2020, proses pemberlakuan secara wajib untuk 8 SNI, penguatan SDM Pengawas Standarisasi Industri melalui Pelatihan PPNS untuk 25 orang, pengawasan produk yang diberlakukan SNI wajib - Jumlah SNI Bidang Industri per Juni 2020: 4.984 Persentase progress fisik: 113 SNI (2,3 %) yang diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian. 173 SNI (3,4 %) yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha.	- Masih lemahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menerapkan SNI. - Kurangnya infrastruktur khususnya sarana pengujian. - Belum efektifnya penerapan Perpres Nomor 16 tahun 2018 untuk mendorong penggunaan produk ber-SNI - Keterbatasan anggaran untuk kaji ulang SNI Bidang Industri yang sudah berumur ≥ 5 thn. (± 80% dari 4.984 SNI Bidang Industri)	- Membina perusahaan industri melalui bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standarisasi Industri. - Meningkatkan infrastruktur standarisasi untuk SDM, sarana dan prasarana pengujian. - Meningkatkan pengawasan SPPT-SNI di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar melalui koordinasi dengan K/L terkait - Meningkatkan pengawasan LSPro dlm menerbitkan SPPT-SNI	Triwulan III	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standarisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/di harmonisasi	5 Rancangan	50%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	38%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	Dampak covid 19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang penunjukan LPK dan penyusunan skema sertifikasi produk SNI serta tertunda/ terhambatnya pelaksanaan sidang terkait regulasi teknis standarisasi ditingkat ASEAN	melakukan revisi anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan FGD panel penunjukan secara online	5 bulan atau sampai dengan Nopember 2020	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Kerjasama Standarisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standarisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standarisasi Industri	1 Naskah	50%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	38%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertunda/terhambatnya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dan Skema sertifikasi	mengikuti jadwal penyusunan Rancangan kebijakan	5 bulan atau sampai dengan Nopember 2020	- Kepala Subbidang Penguatan Standarisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standarisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	50%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik)	40%	1) Rapat koordinasi 2) Pengawasan ke LPK Turangga, AGS, LUK, Lab Uji Modern Testing 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU 4) koordinasi dengan Kepolisian RI 5) terselenggaranya FGD Pengawasan LPK pada Juni 2020 di Jakarta	Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pengawasan LPK dan tertundanya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum standarisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) secara berkala/sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib. Catatan: koordinasi dengan aparat penegakkan hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik	Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan	Triwulan III	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standarisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standarisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	50%	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA- KL 4) rapat koordinasi	32%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) tersusunnya dokumen penganggaran & program sesuai pagu indikatif PSI TA 2021	Dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	Menyegerakan pelaksanaan kegiatan yang tertunda setelah situasi memungkinkan	Triwulan III	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha